

**MERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 14B

Telp/Fax. 0275-325667

Email : bpbd@purworejokab.go.id

Website: www.bpbd.purworejokab.go.id



L K j I P

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan dimana sampai dengan saat ini masih dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab serta menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019.

LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan pertanggung jawaban kinerja pada pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan. LKjIP Tahun 2019 merupakan laporan tahun ke-4 dari rencana strategis (Renstra) BPBD tahun 2016-2021.

Penyusunan LKjIP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja secara kuantitatif pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menuju good governance, wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo diukur atas dasar penilaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra BPBD Tahun 2016-2021, dan dalam Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2019.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan partisipasi dalam penyusunan LKjIP ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat untuk perbaikan pelaksanaan penyelenggaraan kinerja pemerintah khususnya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kabupaten Purworejo dimasa yang akan datang.

Purworejo, Januari 2020
KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN PURWOREJO



Drs. SUTRISNO, M.Si

NIP. 19630906 198603 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	V
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum.....	3
1.4. Profil Organisasi	4
1.5. Susunan dan Struktur Organisasi	6
1.6. Sumber Daya	7
1.7. Permasalahan dan Isu Strategis	9
1.8. Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
2.1. Rencana Stategis	12
2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Kerangka Acuan Kinerja	18
3.2. Capaian Kinerja.....	21
3.3. Analisis Capaian Kinerja.....	22
3.3.1. Target dan Realisasi Kineja Tahun 2019	22
3.3.2. Rekapitulasi Capaian Sasaran	36
BAB IV PENUTUP.....	38
4.1. Simpulan Umum	38
4.2. Simpulan Capaian Kinerja	38
4.3 Rencana Aksi	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Daftar Sarana dan Prasaran	8
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran	13
Tabel 2.2.	Perjanjian Bupati dengan Kepala Pelaksana	16
Tabel 2.3.	Perjanjian Kepala Pelaksana dengan Pejabat Eselon ..	17
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja	23
Tabel 3.2.	Capaian Program.....	25
Tabel 3.3.	Capaian Kegiatan	29
Tabel 3.4.	Jumlah Titik Kejadian Bencana.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi	7
Gambar 3.1.	Kejadian Bencana	36
Gambar 1.2.	Dsar Hukum	

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

1.1. Latar Belakang

Dengan bergulirnya era otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengisyaratkan alur perubahan paradigma pemerintahan dengan kebijakan desentralisasi. Konsekuensi perubahan tersebut, daerah dituntut untuk dapat mengatur, memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya di daerahnya sendiri untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun dibalik itu, daerah memiliki keterbatasan kemampuan baik dari aspek sumber dana pembangunan maupun dari aspek kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana pembangunan, termasuk juga bagaimana pemerintah daerah menghadapi segala permasalahan pembangunan melalui perencanaan, penganggaran, monitoring evaluasi, sampai dengan pelaporan kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan.

Sementara itu seiring dengan meningkatnya wawasan dan kesadaran politik masyarakat bersamaan dengan proses globalisasi dan demokratisasi, maka tuntutan akan terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) semakin mengemuka. Salah satu prinsip dasar dari good governance adalah bagaimana pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah dengan mengedepankan asas efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan secara transparan. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin akuntabilitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik maka perlu dilakukan evaluasi atas kinerja pemerintah setiap tahunnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purworejo merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga memiliki tanggungjawab yang besar

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2019.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penggunaan anggaran di tahun 2019. Hal ini diwujudkan melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat yaitu Bupati Purworejo atas kinerja yang telah dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan kinerja.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah:

1. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Th 2004 Nomor 5);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Sistem Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penangan Pengungsi di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
13. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 5 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019;
21. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2019;
23. Peraturan Bupati Purworejo Nomor : 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Purworejo
24. Instruksi Bupati Purworejo Nomor 188.5/213/2000 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

1.4. Profile Organisasi

BPBD dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Purworejo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan sewaktu-waktu saat dibutuhkan apabila dalam kondisi darurat bencana;
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam rangka penanggulangan bencana;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD, APBN serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sah; dan
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan senantiasa bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang penanggulangan bencana;
4. Pembinaan UPT dalam lingkup penanggulangan bencana;

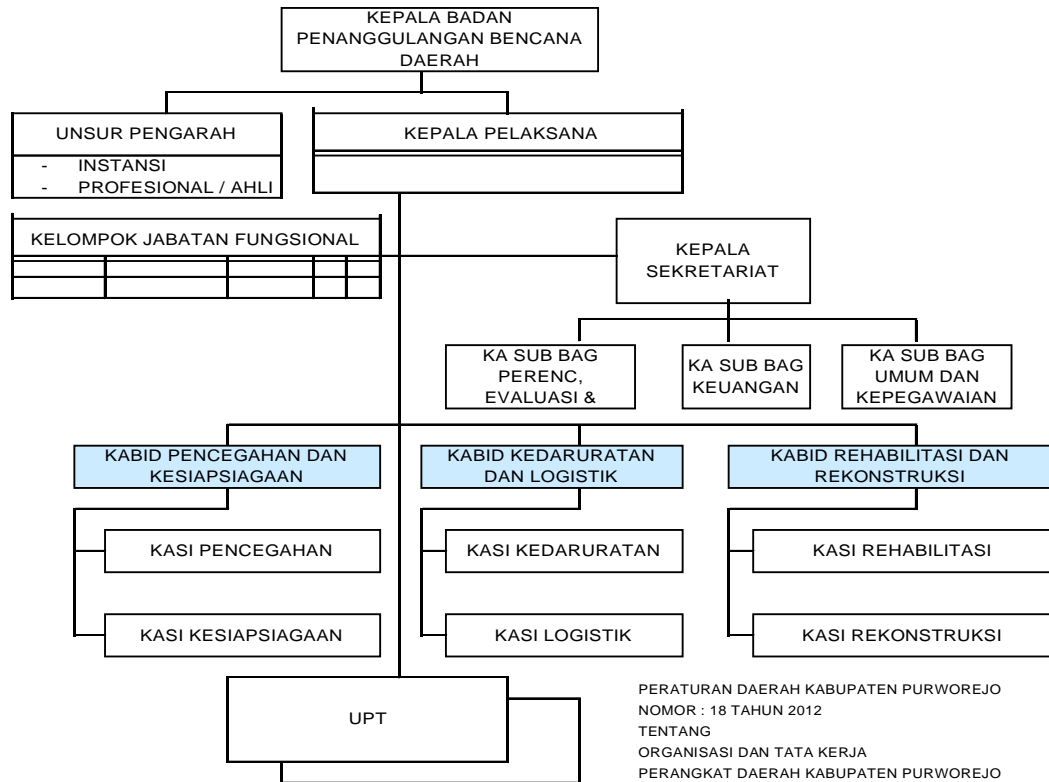
5. Penyelenggaraan kesekretariatan Badan; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

1.5. Susunan dan Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo terdiri meliputi:

1. Kepala Badan, membawahi:
 - a. Unsur Pengarah;
 - b. Unsur Pelaksana, membawahi:
 - 1) Sekretariat;
 - 2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 3) Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - 4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - 5) UPT; dan
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional
2. Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
3. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi:
 - a. Kasubag. Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - b. Kasubag. Keuangan; dan
 - c. Kasubag. Umum dan Kepegawaian.
4. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan membawahi:
 - a. Kasi. Pencegahan; dan
 - b. Kasi. Kesiapsiagaan.
5. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi:
 - a. Kasi Kedaruratan; dan
 - b. Kasi Logistik
6. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi:
 - a. Kasi Rehabilitasi; dan
 - b. Kasi Rekonstruksi.
7. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
8. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebaga ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2012.

1.6. Sumber Daya

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo pada tahun 2019 memiliki sumberdaya manusia sejumlah 68 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin:

- a. Laki-Laki : 22 orang
- b. Perempuan : 5 orang

2. Jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan:

- a. Sarjana Strata 2 (S2) : 7 orang
- b. Sarjana Strata 1 (S1/D.IV) : 10 orang
- c. Sarjana Muda/D.III : - orang
- d. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas : 10 orang

3. Jumlah pegawai berdasarkan golongan :

- a. Golongan IV : 7 orang
- b. Golongan III : 13 orang
- c. Golongan II : 7 orang
- d. Non-PNS : 41 orang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo memiliki sarana prasarana yang jauh di bawah standar untuk kategori sebuah organisasi yang mengemban tugas pencegahan penanggulangan penanganan dan rekonstruksi kebencanaan.

Tabel 1.1
Daftar Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan
1.	Mobil Rescue	1	Unit
2.	Sepeda Motor Operasional	14	Unit
3.	Sepeda Motor Trail	4	Unit
4.	Mobil Pick Up	1	Unit
5.	Truck Tangki Air	2	Unit
6.	Truck Evakuasi	1	Unit
7.	Excavator	2	Unit
8	Alat Pemotong Baja dan Beton	1	Unit
9	Rompi Pelampung	26	Unit
10	Perahu Karet kapasitas 8 Orang	3	Unit
11	Perahu Fiber	4	Unit
12	Mesin Perahu 40 PK	1	Unit
13	Mesin Perahu 25 PK	1	Unit
14	Mesin Perahu 15 PK	2	Unit
15	Peralatan Selam	2	Unit
16	Chain Saw	4	Unit
17	Helm	10	Unit
18	Pompa Perahu	1	Unit
19	Selang BBM	4	Unit
20	Sandaran Mesin Tempel	1	Unit
21	Tangki BBM	4	Unit
22	Dayung	26	Unit
23	Sepatu Boot	100	Unit
24	Perahu Polytelin	2	Unit
25	Mesin Pompa Apung	2	Unit
26	Perahu Lipat 4,28m	1	Unit
27	Perahu Lipat 3,85m	1	Unit
28	Tenda Posko	1	Set
29	Tenda Keluarga	12	Unit
30	Velbed	24	Unit
31	Tandon Air	20	Unit
32	Jas Hujan	50	Unit
33	Tenda Pengungsi	2	Unit
34	Senter	50	Unit
34	Solar Cell	5	Unit
36	Solar Handle Lamp	12	Unit
37	Lampu Senter HID	1	Unit

38	Genset 5 KVA	3	Unit
39	Genset 10 KVA	2	Unit
40	Kabel	8	Unit
41	Trolley	6	Unit
42	Selang Buang	2	Unit
43	Pompa Air	6	Unit
44	EWS	21	Unit
45	HT	35	Unit

1.7. Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Keterbatasan sumberdaya ASN, jumlah PNS BPBD hanya 26 orang.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana penanganan bencana
3. Koordinasi lintas Perangkat Daerah yang masih belum optimal. Beberapa perangkat daerah belum terlihat aktif dalam penanggulangan bencana.
4. Koordinasi dengan masyarakat dan dunia usaha belum optimal terutama saat penanggulangan bencana.
5. Perhatian pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam hal pembangunan kembali (rehabilitasi dan rekonstruksi) pasca bencana belum optimal.
6. Ada 328 desa / Kelurahan dari 494 desa / kelurahan di kabupaten purworejo belum optimal dalam penanggulangan bencana khususnya mitigasi struktur maupun non struktur

Dari beberapa permasalahan tersebut di atas, hal yang menjadi Isu strategis dalam rangka penanggulangan bencana di Kabuapten Purworejo adalah:

1. Kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana daerah belum optimal;
2. Sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha belum optimal;
3. Sarana prasarana penanggulangan bencana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) belum optimal, bahkan peralatan pemadam kebakaran hutan dan lahan belum dimiliki.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor : 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Purworejo, sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran

B A B II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2018

2.1. Rencana Strategis

Visi dan misi Bupati Purworejo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 menetapkan Visi “Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang semakin sejahtera berbasis pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan yang berwawasan budaya, lingkungan, dan ekonomi kerakyatan”.

Dalam mewujudkan Visi tersebut, didukung oleh Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religius dan demokratis;
2. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan;
3. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan wisata unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal;
4. Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni, budaya dan olahraga;
5. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan;
6. Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik;
7. Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang.

Guna mencapai Visi Bupati, Misi yang relevan dengan Tugas dan Fungsi BPBD tercantum pada misi ke-6, Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik. Visi dan Misi tersebut di atas kemudian dijabarkan melalui tujuan dan sasaran yang lebih operasional disertai indikator keberhasilan sebagai bagian dalam rangka mengukur kinerja Perangkat Daerah

Tujuan jangka menengah daerah sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Renstra BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 adalah: “Meningkatkan kerjasama masyarakat dan pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat”.

Adapun Sasaran jangka menengah sebagai penjabaran operasional dari tujuan tersebut adalah

1. Optimalnya pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah dengan indikator cakupan pelayanan penanggulangan bencana.
2. Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah dengan indikator cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta Indikator Kinerja dan Target Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Purworejo

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Optimalnya pelayanan penanggulangan bencana dan	cakupan pelayanan penanggulangan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Purworejo tahun 2019:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyedia jasa kebersihan kantor
 - d. Penyedia alat tulis kantor
 - e. Penyedia barang cetakan dan penggandaan
 - f. Penyedia komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
 - g. Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
 - h. Penyediaan makanan dan minuman
 - i. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - j. Rapar – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
 - k. Penyedia peralatan kebersihan dan bahan pembersih
 - l. Penyedia peralatan rumah tangga
2. Program peningkatan sarana dan prasarana
 - a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - d. Penyediaan pakaian dinas pegawai dan perlengkapannya
 - e. Pengadaan pakaian khusus
 - f. Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Pelaporan Keuangan
 - b. Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
5. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan
 - a. Penyusunan Data dasar pembangunan
6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah
 - a. Posko Siaga SAR
 - b. Pelatihan SAR Penanganan Bencana
 - c. Pengembangan Kompetensi Dasar Manajemen Bencana
 - d. Penyuluha Daerah Rawan Bencana

- e. Fasilitasi Forum Pengurangan Resiko Bencana
- f. Penyusunan Rencana Kontijensi
- g. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
- h. Pengadaan Early Warning System
- i. Kegiatan Tanggap Darurat Bencana
- j. Tim Kaji Bencana
- k. Pengelolaan Logistik Tanggap Darurat Bencana Alam
- l. Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana Alam (Pusdalop-PB)
- m. Gladi Posko Pusdalop
- n. Gladi Lapang Penanggulangan Bencana
- o. Pemantauan Lokasi Pasca Bencana
- p. Pelatihan Recovery Pasca Bencana
- q. Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)
- r. Penyusunan Rencana Teknis Rehab Rekon Akibat Bencana
- s. Fasilitas Desa Tangguh Bencana
- t. Verifikasi Perbaikan Perumahan Akibat Bencana
- u. Pengadaan tanah relokasi bencana

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran program dan kegiatan,

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 merupakan tahun ke-empat Renstra BPBD Kabupaten Purworejo, sehingga capaian kinerja tahun 2019 tersebut baru mencerminkan capaian ke-empat dari rencana capaian Renstra 2016-2021.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Bupati dengan Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2019	Program	Anggaran (Rp)
Tujuan : Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik				
Optimalnya pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah	Prosentase pelayanan penanggulangan bencana	100%	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah	3.927.229.405
Meningkatnya hubungan kinerja perangkat daerah	Prosentase dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	427.354.600
		100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	505.846.900
		100%	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	112.680.000
		100%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	39.366.500
		100%	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	104.020.000

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana BPBD dengan Pejabat Eselon
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Purworejo

Program	Indikator	Target	Anggaran (Rp)
Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana daerah	Kelompok Jejaring Kebencanaan	16 wilayah	3.927.229.404
	Cakupan wilayah pencegahan bencana	100%	
	Prosentase ketersediaan analisis jenis bencana	100%	
	Cakupan kejadian tanggap darurat yang tertangani	100%	
	Jumlah desa tangguh bencana	50 Desa	
	Cakupan pemenuhan sarana prasarana pasca bencana	60%	
	Cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kewilayahan	18,29%	
	Tingkat pemberdayaan masyarakat pasca bencana	40%	
	Cakupan perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/sosial	75%	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	427.354.600
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik	100%	505.846.900
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	39.366.500
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	112.680.000
Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase Tersedianyan Data Dasar Pembangunan	100%	104.020.000
Catatan : pagu anggaran pada indikator program merupakan penggabungan dari pagu kegiatan			

B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan :

Capaian kinerja BPBD untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

Uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja BPBD sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo adalah perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2019 tergambar dalam tingkat pencapaian tujuan, sasaran dan program yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan.

Pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019, dengan parameter indikator kinerja, capaian kinerja, hambatan/kendala serta langkah-langkah solusi/antisipasi. Penyajian akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran.

3.1. Kerangka Pengukuran kinerja

Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Dasar ketentuan pengukuran kinerja adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja serta Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2017 tentang pedoman teknis perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Pengukuran kinerja dengan cara membandingkan target dengan realisasi capaian berikut ini.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Hasil Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 akan dapat diketahui status capaian masing-masing indikator yang dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu sebagai berikut ini:

- a. Tercapai. Apabila capaian kinerja Tahun 2019, telah tercapai 100% atau lebih dari Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021. Simbol yang digunakan adalah tanda (O) warna hijau.
- b. Tidak Tercapai. Apabila capaian kinerja Tahun 2019, kurang dari Target Akhir RPJMD Tahun 2016 - 2021. Simbol yang digunakan adalah tanda (<) warna merah.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

- a. Realisasi Kinerja Tahun 2019 terhadap Tahun-tahun sebelumnya (2015,2016,2017,2018).

Alat ukur yang digunakan adalah tabel realisasi kinerja 2019 dan tahun-tahun sebelumnya (2015,2016,2017,2018).

Catatan Intepretasi :

Relevan warna hijau, jika Realisasi Kinerja Tahun 2019 trendnya sesuai dngan Realisasi Kinerja Tahun-tahun sebelumnya (2015,2016,2017,2018) (Realisasi Kinerja Tahun 2019 sama dengan atau lebih besar dari rata-rata data series capaian kinerja tahun 2015,2016,2017, dan 2018) dan

Tidak Relevan warna merah, Jika Realisasi Kinerja Tahun 2019 trendnya **tidak sesuai** dengan Realisasi Kinerja Tahun-tahun sebelumnya (2015,2016,2017,2018) (Realisai Kinerja Tahun 2019 sama dengan atau lebih besar dari rata-rata data series capaian kinerja Tahun 2015,2016,2017 dan 2018).

- b. Capaian Kierja Tahun 2019 terhadap tahun-tahun sebelumnya (2017,2018).

Alat ukur yang digunakan adalah capaian kinerja 2019 dan tahun-tahun sebelumnya (2017,2018).

Catatan Intepretasi :

Efektif warna hijau, jika capaian kinerja tahun 2019 trendnya **sesuai** dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya (2017,2018). Keterangan : (Capaian Kinerja tahun 2019 sama

dengan atau lebih besar dari rata-rata data series capaian kinerja tahun 2017, dan 2018) dan;

Tidak Efektif warna merah, jika capaian kinerja tahun 2019 trendnya **tidak sesuai** dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya (2017 dan 2018). Keterangan : (capaian kinerja tahun 2019 lebih kecil dari rata rata data series capaian kinerja tahun 2017 dan 2018).

3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Alat ukur yang digunakan adalah tabel realisasi PK tahun 2019 target tahun 2019 pada RPJMD 2016-2021 dan target akhir tahun (tahun 2021) pada RPJMD 2016-2021.

Catatan intepretasi :

- a. **Tercapai (O)** warna hijau, jika realisasi tahun 2019 sudah tercapai sesuai atau lebih dari target akhir tahun (tahun 2021);
 - b. **Akan Tercapai (=>O)** warna kuning, jika realisasi tahun 2019 sudah tercapai sesuai atau lebih dari target tahun 2019 tetapi dibawah target akhir tahun (tahun 2021);
 - c. **Tidak Tercapai (<)** warna merah, jika realisasi todak tercapai sesuai target tahun 2019.
4. Perhitungan capaian kinerja sasaran strategis

Catatan Intepretasi :

- a. **Tercapai (O)** warna hijau, jika semua (100%) IKU sasaran strategis tercapai;
- b. **Akan Tercapai (=>O)** warna kuning, jika rata-rata IKU sasaran strategis $\geq 90\%$
- c. **Tidak Tercapai (<)** warna merah, jika rata—rata nilai IKU strategis $< 90\%$.

5. Perhitungan capaian kinerja Pemerintah Daerah

Rumusan nilai capaian kinerja Pemerintah Daerah

$$\frac{\text{(Jumlah Sasaran Strategis berstatus Tercapai + Akan Tercapai)}}{\text{Jumlah Sasran Strategis}}$$

Jumlah Sasran Strategis

Hasil penilaian kinerja N-LKjIP, dikelompokkan kedalam kategori sebagai berikut :

- a. $90\% > N_LKjIP \leq 100\%$ dikategorikan Sangat Baik

- b. $80\% > N_LKjIP \leq 90\%$ dikategorikan Baik
- c. $60\% > N_LKjIP \leq 80\%$ dikategorikan Cukup atau Normal
- d. $50\% > N_LKjIP \leq 60\%$ dikategorikan Kurang
- e. $N_LKjIP \leq 50\%$ dikategorikan Sangat Kurang

3.2. Capaian Kinerja

Penerbitan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menandai babak baru upaya penanggulangan bencana dimana membawa perubahan paradigma penanggulangan bencana dari tindakan responsif menjadi preventif. Selain itu penanggulangan bencana juga menjadi tugas dan tanggungjawab masing-masing pemerintah daerah yang perlu ditangani secara cepat, tepat dan komprehensif. Konsekuensi perubahan tersebut, daerah dituntut untuk dapat mengatur, memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya di daerahnya sendiri untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Capaian kinerja sasaran mampu memenuhi target yang ditetapkan, yaitu 100% pada sasaran urusan dan sasaran non urusan. Indikator capaian ini dapat jelaskan bahwa semua kejadian bencana yang ada di Kabupaten Purworejo senantiasa mendapatkan penanganan. Penanganan dimaksud bukan diartikan permasalahan kebencanaan dapat diselesaikan, karena tidak semua kasus kebencanaan bias diselesaikan dengan waktu dan dana yang terbatas. Capaian indikator program terdapat tiga indikator yang tidak tercapai, selain karena tidak tersedianya anggaran juga disebabkan tidak cukup waktu untuk menyelesaikan permasalahannya.

Kinerja penyerapan keuangan BPBD Kabupaten Purworejo pada dasarnya cukup baik. Capaian kinerja keuangan tahun 2019 sebesar 96,87%. Angka tersebut dapat lebih maksimal apabila kegiatan Pengadaan Tanah Relokasi Pasca Bencana yang sesuai rencana output adalah 2 bidang tanah di 2 lokasi hanya terealisasi 1 bidang.

Karena tidak terealisasinya 1 bidang tanah tersebut, sehingga kinerja penyerapan anggaran kegiatan tersebut tidak mencapai 100%. Berdasarkan rekomendasi dari PVMBG bahwa sebidang tanah tersebut kurang layak untuk lokasi relokasi.

3.3. Analisis Capaian Kinerja

3.3.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo di Tahun 2019 melaksanakan 6 program dan 43 kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran. Capaian sasaran strategis sebesar 100% dengan telah terpenuhinya indikator sasaran, yaitu Cakupan pelayanan penanggulangan bencana dan capaian dukungan terhadap kinerja perangkat daerah. Capaian fisik kegiatan terealisasi 99,27%. Dari keenam program tersebut telah berhasil mendukung keberhasilan pencapaian sasaran dalam rangka pemenuhan persentase cakupan pelayanan penanggulangan bencana dan cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah mencapai yaitu 100%.

Namun demikian perlu peningkatan kualitas pelayanan agar semakin baik. Peningkatan kualitas pelayanan merupakan hal penting mengingat pada Indek Risiko Bencana Indonesia tahun 2013 sebagai bahan acuan dalam pelayanan penanggulangan bencana di Purworejo.

Kabupaten Purworejo menempati nomor 13 urutan nasional dengan skor bencana mencapai 215 dengan kelas risiko tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayahnya Kabupaten Puworejo merupakan daerah dengan potensi ancaman bencana yang cukup tinggi. Menurut Dokumen Kajian Resiko Bencana Tahun 2014 menggambarkan bahwa dari 494 Desa/Kelurahan, terdapat 328 Desa/Kelurahan yang masuk kategori Desa/Kelurahan rawan bencana, artinya area rawan bencana di Kabupaten Puworejo mencapai 66,19% dari seluruh desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Purworejo.

Tingkat capaian kinerja indikator Kinera Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo pada tahun 2019 disajikan dalam tabel 3.2. sebagai berikut ini.

Tabel 3.1.
 Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Purworejo Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja Tahun 2019			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Optimalnya pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana	100%	100%	100%	O
2	Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	O

Capaian kinerja sasaran dapat mencapai 100% karena BPBD Kabupaten Purworejo telah melaksanakan langkah-langkah penanggulangan bencana pada saat sebelum terjadi bencana (pra bencana). Langkah yang telah ditempuh berupa menyiapkan sumber daya masyarakat khususnya di wilayah rawan bencana. Dengan membentuk penyelenggaraan sosialisasi kebencanaan, membentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana), pelatihan-pelatihan untuk aparaturnya maupun masyarakat.

Apabila ada bencana, BPBD juga telah menyiapkan berbagai antisipasi seperti penyediaan logistik, penyiapan peralatan-peralatan kebencanaan, menjalin kerjasama dengan masyarakat (relawan), pemerintah dan dunia usaha. Pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan sebelum terjadi bencana juga dimaksudkan untuk antisipasi bila ada bencana nantinya telah dimiliki SDM yang kompeten dari aparaturnya maupun masyarakat (relawan).

Pada saat pasca bencana, BPBD juga telah menindak lanjuti penanganan melalui penyaluran bantuan rehabilitasi rumah terdampak bencana dan relokasi rumah terdampak bencana. Relokasi dan rehabilitasi fisik sebatas sampai dengan tahap fasilitasi pengusulan melalui tim kaji, sedangkan pelaksanaan relokasi/rehabilitasi diserahkan kepada Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pelatihan sumber daya pada fase ini juga ditempuh melalui pelatihan pengkajian kebutuhan pasca bencana.

Analisis capaian kinerja dari 2 Sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Optimalnya pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada wala periode perencanaan (Tahun 2015)	Kinerja 2016		Kinerja 2017		Kinerja 2018		Kinerja Tahun 2019			Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Target	Capaian	Taget	Capaian	Taget	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Cakupan pelayanan penanggulangan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian kinerja tahun 2019												100%	O
Hasil perbandingan Realisasi Tahun 2019 terhadap tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018												100%	relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 terhadap Tahun 2017 dan 2018													efektif
Capaian Kinerja s.d 2019 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2021)													=>O
Capaian 2019 terhadap standar nasional	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Capaian sasaran												100%	O

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada wala periode perencanaan (Tahun 2015)	Kinerja 2016		Kinerja 2017		Kinerja 2018		Kinerja Tahun 2019			Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Target	Capaian	Taget	Capaian	Taget	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Cakupan pelayanan penanggulangan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian kinerja tahun 2019												100%	O
Hasil perbandingan Realisasi Tahun 2019 terhadap tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018												100%	Relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 terhadap Tahun 2017 dan 2018													Efektif
Capaian Kinerja s.d 2019 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2021)													=>O
Capaian 2019 terhadap standar nasional	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Capaian sasaran												100%	O

Tabel 3.2.
Capaian Program
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kinerja Fisik			Kinerja Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah	Kelompok Jejaring Kebencanaan	16 wilayah	16 wilayah	100%	416.667.700	382.069.650	91,70%	Telah terbentuk jejaring kebencanaan di 16 kecamatan
	Cakupan wilayah pencegahan bencana	100%	80,48%	80,48%	132.930.000	132.819.950	99,92%	264 dari 328 desa rawan telah mendapat sosialisasi kebencanaan
	Prosentase ketersediaan analisis jenis bencana	100%	87,50%	87,50%	46.475.500	46.475.350	100%	7 dari 8 dokumen telah tersusun
	Cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kewilayahan	18,29%	7,32%	40,21%	339.330.900	336.814.700	92,26%	24 dari 328 desa rawan telah tersedia sarana prasarana kesiapsiagaan bencana
	Cakupan kejadian tanggap darurat yang tertangani	100%	100%	100%	2.129.013.049	2.088.568.173	98,10%	Semua kejadian bencana di tahun 2019 telah mendapat penanganan
	Tingkat pemberdayaan masyarakat pascabencana	40%	41%	102,5%	-	-	-	9 dari 22 kelompok terdampak bencana telah di berdayaan
	Cakupan pemenuhan sarana prasarana pasca bencana	60%	87%	145%	658.913.256	602.102.713	91,86%	13 dari 15 sarana prasarana umum yang rusak akibat bencana telah terfasilitasi perbaikannya

	Jumlah DesaTangguh Bencana	50 desa	56 desa	112%	163.899.000	163.761.000	99,92%	Sampai dengan tahun 2019 telah terbentuk 56 Desa tangguh bencana
	Cakupan perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/sosial	75%	99%	132%	40.000.000	39.951.276	100%	269 dari 272 rumah rusak akibat bencana telah terfasilitasi perbaikannya
Program Pelayanan Administrasi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	427.354.600	419.570.759	98,18%	Jumlah kegiatan pada layanan administrasi tahun 2019 ada 11 dan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Cakupan saranaprasarana aparatuyang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	505.846.900	489.896.858	96,85%	Jumlah sarpras utama/vital dg kondisi baik tahun 2019 sebanyak 6 jenis dan difungsikan/dimanfaatkan dengan baik :
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	39.366.500	39.134.150	99,41%	Telah tersusun dokumen pelaporan keuangan dan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan Kapasitas sumberdaya aparaturn	100%	100%	100%	112.680.000	111.536.000	98,98%	aparatur yang akan mengikuti diklat/bimtek dan sejenisnya 44 orang dan yang telah mengikuti bimtek selama tahun 2019 sebanyak 44 orang.
Program Penyusunan DataDasar	Prosentase Tersedianya Data Dasar Pembangunan	100%	100%	100%	104.020.000	103.666.000	99,66%	Telah tersusun dokumen Data Dasar Pembangunan BPBD

Tahun anggaran 2019 BPBD melalui 6 program dengan 14 indikator terdiri dari 5 program non urusan dengan 5 indikator dan 1 program urusan dengan 9 indikator, Program non urusan (Kesekretariatan) dengan capaian 100% sebagaimana target. Pada urusan kebencanaan terdiri atas 9 indikator program, terdapat 3 indikator yang tidak tercapai, 4 indikator melebihi target, dan 2 indikator tercapai.

Keberhasilan dalam mencapai target kinerja karena kerja tim senantiasa terfokus pada target dengan didukung dengan penganggaran yang cukup. Pada indikator non urusan penekanan penilaian pada tercukupinya pelayanan administrasi perkantoran serta tidak meninggalkan permasalahan.

Ada 3 indikator program yang tidak tercapai target. Pada indikator cakupan wilayah pencegahan bencana hanya tercapai 80,48%, indikator ini menggambarkan Persentase desa/kelurahan rawan bencana yang disosialisasi kebencanaan terhadap seluruh desa rawan bencana (Jumlah desa/kelurahan rawan bencana menurut KRB tahun 2014 sebanyak 328 desa) luasnya cakupan 328 desa serta terbatasnya pendanaan dan sumber daya aparatur menjadi salah satu permasalahannya.

Prosentase ketersediaan analisis jenis bencana menggambarkan Persentase jumlah dokumen kebencanaan yang harus dimiliki terhadap jumlah dokumen kebencanaan yang seharusnya dimiliki (ada 8 dokumen yang harus diterbitkan), Reviu dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) yang telah diterbitkan tahun 2014 hanya berlaku hingga 2018. KRB Tahun 2014 disusun oleh BNPB dengan dana yang relatif besar karena melibatkan ahli dengan kajian yang cukup menyita waktu, tenaga, dan pikiran. Karena keterbatasan anggaran, pada tahun 2019 hanya menyusun Reviu Dokumen Kontijensi Banjir.

Indikator Cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kewilayahan adalah Presentase ketersediaan alat deteksi kebencanaan dan atau peralatan kebencanaan terhadap jumlah desa/ kelurahan rawan bencana (Jumlah desa/kelurahan rawan bencana 328) merupakan cermin kesiapsiagaan sarana prasarana berupa software dan hardware dalam penanggulangan bencana. Hingga tahun 2019 pendataannya belum optimal terutama yang dimiliki oleh Non BPBD.

Pada tahun 2020 diharapkan pendataan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kewilayahan dapat disempurnakan sehingga BPBD, milik Masyarakat maupun milik Instansi lain.

Tabe 3.3
Capaian Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo

Program dan Kegiatan	Fisik			Keuangan		
	Rencana Output	Realisasi Output	Kinerja Output (%)	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Output (%)
1	2	3	4	5	6	7
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah						
Posko Siaga SAR	3 Posko	3 Posko	100%	479.815.000	478.641.850	99,76%
Pelatihan SAR Penagnanan Bencana	21 orang	21 orang	100%	104.460.000	104.295.900	99,84%
Pengembangan Kompetensi Dasar Manajemen Bencana	20 orang	20 orang	100%	84.687.500	50.828.750	60,02%
Penyuluhan Daerah Rawan Bencana	120 desa	120 desa	100%	132.930.000	132.819.950	99,92%
Fasilitasi Forum Pengurangan Resiko Bencana	12 bulan	12 bulan	100%	18.227.000	182.10.850	99,91%
Penyusunan Rencana Kontijensi	1 dokumen	1 dokumen	100%	46.475.500	46.475.350	100%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	21 unit	21 unit	100%	145.497.500	145.484.700	99,99%
Pengadaan Early Warnng System	2 unit	2 unit	100%	193.833.400	191.330.000	98,71%
Kegiatan Tanggap Darurat	12 bulan	12 bulan	100%	847.465.449	810.950.359	95,69%

Bencana						
Tim Kaji Bencana	1 dokumen	1 dokumen	100%	13.027.900	13.017.900	99,92%
Pengelolaan Logistik Tanggap Darurat Bencana Alam	16 jenis	16 jenis	100%	541.244.700	539.115.064	99,61%
Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana Alam (Pusdalop-PB)	12 bulan	12 bulan	100%	247.460.000	246.843.000	99,75%
Gladi Posko Pusdalop	60 orang	60 orang	100%	30.139.500	30.139.500	100%
Gladi Lapang Penanggulangan Bencana	500 orang	500 orang	100%	114.238.500	114.223.450	99,99%
Pemantauan Lokasi Pasca Bencana	1 dokumen	1 dokumen	100%	36.750.000	36.382.440	99,00%
Pelatihan Recovery Pasca Bencana	30 orang	30 orang	100%	64.915.200	64.371.200	99,16%
Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)	40 orang	40 orang	100%	66.500.000	66.166.335	99,5%
Penyusunan Rencana Teknis Rehab Rekon Akibat Bencana	1 dokumen	1 dokumen	100%	86.010.000	85.337.078	99,22%
Fasilitasi Desa Tangguh Bencana	15 Desa	15 Desa	100%	163.899.000	163.761.000	99,92%
Verifikasi Perbaikan Perumahan Akibat Bencana	1 dokumen	1 dokumen	100%	40.000.000	39.951.276	99,88%
Pengadaan Tanah Relokasi Bencana	2 lokasi	1 lokasi	92,08	469.653.256	414.216.860	88,2%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
Penyediaan Jasa Surat menyurat	12 bulan	12 bulan	100%	4.236.000	4.233.500	99,94%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100%	93.700.000	90.722.219	96,82%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	20.910.000	20.808.000	99,51%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	46 jenis	46 jenis	100%	15.436.000	15.436.000	100%
Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	5 jenis	5 jenis	100%	9.074.700	9.073.250	99,98%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24 jenis	24 jenis	100%	4.234.800	4.234.800	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 jenis	3 jenis	100%	3.764.700	3.690.000	98,02%
Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	12 bulan	100%	91.774.800	87.196.700	95,01%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 bulan	12 bulan	100%	162.995.000	162.989.290	100%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	12 bulan	12 bulan	100%	10.140.000	10.100.000	99,61%
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 bulan	12 bulan	100%	4.840.000	4.840.000	100%

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13 jenis	13 jenis	100%	6.248.600	6.247.000	99,97%
Program peningkatan sarana dan prasarana						
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2490 m2	2490 m2	100%	72.210.000	72.192.610	99,98%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	3 unit kendaraan roda 6 3 unit kendaraan roda 4 18 unit kendaraan roda 2	3 unit kendaraan roda 6 3 unit kendaraan roda 4 18 unit kendaraan roda 2	100%	109.860.400	109.850.548	99,99%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	17 unit	17 unit	100%	21.714.200	21692500	99,9%
Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	28 potong	26 potong	92,86%	8.680.000	8.036.600	92,59%
Pengadaan pakaian khusus	38 stel	38 stel	100%	100.775.800	88.933.400	88,25%
Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana	4 unit perahu, 3 pompa air, 2 mesin tempel	4 unit perahu, 3 pompa air, 2 mesin tempel	100%	192.606.500	189.191.200	98,23%
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur						
Pendidikan dan Pelatihan	44 orang	44 orang	100%	112.680.000	111.536.000	98,98%

Formal						
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						
Penyusunan Pelaporan Keuangan	18 dokumen	18 dokumen	100%	19.999.600	19.974.550	99,87%
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	6 dokumen	6 dokumen	100%	19.366.900	19.159.600	98,93%
Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan						
S Penyusunan Data Dasar Pembangunan	1 dokumen	1 dokumen	100%	104.020.000	103.666.000	99,66%

Kegiatan tahun 2019 sebanyak 43 kegiatan, terdapat dua kegiatan yang target kinerjanya tidak tercapai. Pada kegiatan penyediaan pakaian dinas pegawai dan perlengkapannya ditargetkan 28 potong namun realisasi hanya 26 potong. Hal ini karena pada saat perencanaan jumlah ASN ada 28 orang dan pada saat pelaksanaan kegiatan hanya ada 26 orang. Sebanyak 2 orang mutasi ke OPD lain dan telah disediakan pakaian dimaksud, sehingga kegiatan di BPBD hanya direalisasikan untuk sebanyak 26 orang. Secara administratif kinerja kegiatan tersebut tidak optimal, namun secara keuangan justru terdapat efisiensi karena bisa berhemat tanpa mengurangi hak ASNnya. Apabila diadakan 28 potong justru akan menimbulkan kemubadziran karena hanya akan disimpan sebagai barang pakai habis yang tidak bisa dikeluarkan.

Kegiatan pengadaan tanah relokasi bencana ditargetkan untuk 2 lokasi hanya terealisasi lokasi. Pengadaan tanah di Desa Donorejo Kecamatan Kaligesing telah diidentifikasi, dikaji, dibentuk tim appraisal, dan usulan anggaran telah ditetapkan, kemudian ada surat dari Bidang Geologi Kementerian ESDM yang menyatakan bahwa calon lokasi relokasi tidak layak untuk hunian. Dengan demikian ketidak tercapainya target kinerja karena mengikuti saran petunjuk dari pihak eksternal yang memiliki legitimasi.

Apabila melihat jumlah titik kejadian, tahun 2019 tercatat sebanyak 416 kejadian bencana di Kabupaten Purworejo. Tren jumlah kejadian bencana meningkat bukan berarti kinerja BPBD yang buruk. Semakin meningkatnya jumlah titik bencana juga memberi sinyal semakin baiknya dokumentasi kejadian semakin bertambahnya tugas BPBD karena semua kejadian bencana selalu mendapat penanganan dari BPBD. Peningkatan atau penurunan kejadian bencana tersebut bukan merupakan kinerja yang dapat ditargetkan dikarenakan semua kejadian bencana merupakan faktor alam dan faktor nonalam yang sulit diprediksi. Namun demikian BPBD telah berupaya melakukan pencegahan dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar mampu mencegah, menangani dan merekonstruksi kebencanaan. Jumlah titik kejadian bencana menurut jenis bencana tersaji dalam tabel 3.5 berikut.

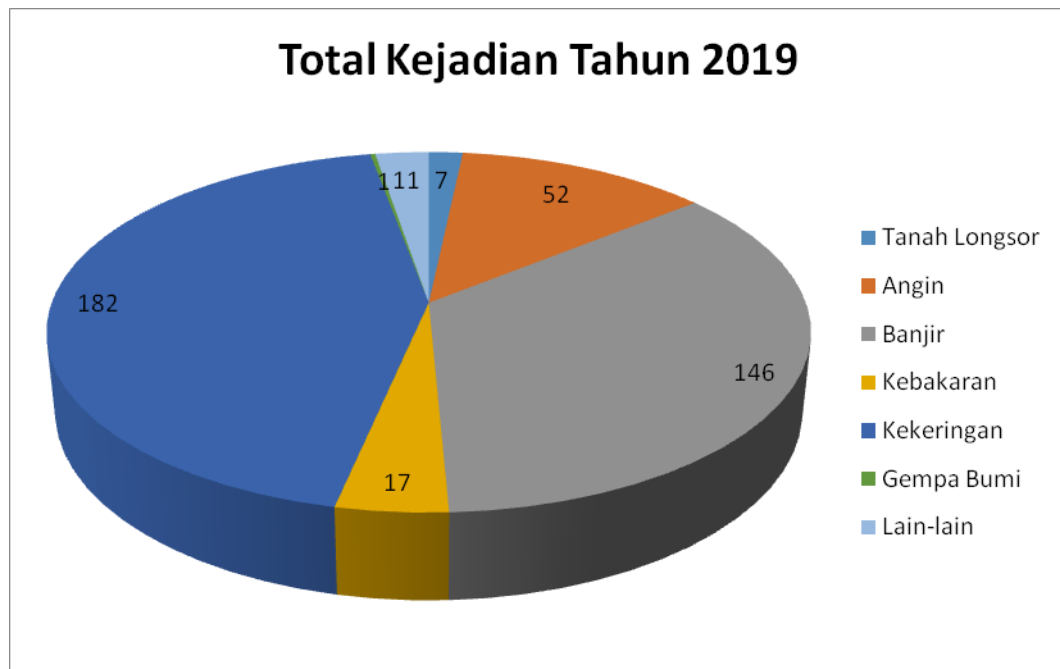
Tabel 3.4.
 Jumlah Titik Kejadian Bencana menurut Jenis Bencana
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo

No.	Jenis Bencana	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
1.	Tanah longsor	83	111	151	173	287	68	7	880
2.	Angin	6	44	50	112	67	38	52	365
3.	Banjir	77	7	23	91	22	20	146	386
4.	Kebakaran	26	22	22	20	0	2	17	109
5.	Kekeringan	0	0	25	0	51	68	182	326
6.	Gempa Bumi	0	13	1	0	1	4	1	20
7.	Lain-lain	10	9	3	7	6	119	11	165
	Jumlah	202	206	275	403	434	319	416	

Kejadian Bencana di Kabupaten Purworejo memiliki karakteristik yang cukup seragam. Periode 2013 sampai dengan 2019 bencana tanah longsor / gerakan tanah merupakan bencana alam terbanyak. Boleh jadi titik bencana tanah longsor bersifat lokal dengan skala luasan wilayah relatif kecil. Berbeda dengan jenis gempa bumi atau banjir, sekali kejadian dampaknya sangat luas dengan kerugian yang juga jauh lebih besar.

Jenis bencana yang terjadi menunjukkan bahwa ancaman potensi bencana di Kabupaten Purworejo relatif cukup tinggi khususnya untuk bencana tanah longsor, banjir dan kekeringan. Tingginya potensi bencana menjadikan tugas dan tanggungjawab BPBD semakin besar. Total kejadian bencana tahun 2019 dapat dilihat dari grafik berikut :

Gambar 3.1
Kejadian Bencana Tahun 2019



3.3.2. Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran

Realisasi kinerja BPBD Kabupaten Purworejo bila disandingkan dengan target pencapaian Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan, maka masuk kategori TERCAPAI. Artinya antara target dan realisasi jangka menengah dan realisasi capaian kinerja dapat dicapai sebagaimana telah di targetkan.

Tabel 3.5.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Kinerja					Target Kinerja 2019	Status Realisasi Capaian 2019
			2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Optimalnya pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah	Cakupan pelayanan penanggulan gan bencana	100%	100%	100%	100%		100%	100%
2.	Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	Cakupan dukungan kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%		100%	100%

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021, indikator yang dimasukkan hanya berkaitan dengan persentase cakupan penanganan bencana dimana target pemerintah pusat adalah 100% disetiap kejadian bencana. Harus diakui bahwa ada beberapa indikator kinerja daerah di bab IX RPJMD penjabaran lebih lanjut ke dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021 juga belum menjadi indikator. Namun demikian setiap bulan tahun beberapa indikator yang menjadi target nasional selalu diukur dan didorong untuk menjadi kebijakan daerah melalui program kegiatan yang diusulkan melalui APBD

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan BPBD untuk meningkatkan kinerjanya.

4.1. Simpulan Umum

Sesuai dengan perjanjian kinerja dari target yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2019 telah mencapai target 96,87% (anggaran kegiatan Rp. 5.116.497.405,00 dan terealisasi Rp. 4.956.366.579,00)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan ditahun 2019 dan perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya ,yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan tujuan dan sasaran. Secara umum capaian sasaran strategis 2016-2021 telah tercapai dengan baik meskipun masih terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaannya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo yang diberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawa. Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah merasa bangga dapat menyelesaikan dan menjawab amanah tersebut dengan baik melalui persentase cakupan penanganan bencana tercapai 100% setiap tahunnya.

Isu strategis sebagaimana telah dituangkan pada Bab I adalah :

1. Kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana daerah belum optimal;
2. Sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha belum optimal;

3. Sarana prasarana penanggulangan bencana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) belum optimal, bahkan peralatan pemadam kebakaran hutan dan lahan belum dimiliki.

4.2. Simpulan Capaian Kinerja

Berdasarkan penilaian terhadap kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo berhasil mencapai target:

Sasaran strategis urusan optimalnya pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah dengan indikator kinerja Cakupan pelayanan penanggulangan bencana mampu mencapai target (capaian 100%). Sasaran strategis non urusan meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja sasaran cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah juga mampu mencapai target (100%).

Capaian indikator program, dari 9 indikator terdapat 3 indikator yang tidak dapat dicapai, yaitu indikator: (1) Cakupan wilayah pencegahan bencana, (2) Cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kewilayahan dan (3) Prosentase ketersediaan analisis jenis bencana yang capaiannya di bawah target kinerja.

Hal keberhasilan ini tidak terlepas dari hasil kerja yang ditunjukkan oleh segenap personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo yang memberikan sumbangan dan kontribusi bagi tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021 serta peran serta stake holder masyarakat dan dunia usaha

4.3 Rencana Aksi

Keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purworejo tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang terjadi, kondisi ini diantisipasi dengan melakukan evaluasi berkala atas kendala/hambatan dan menyiapkan strategi dan cara pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan

tersebut dapat diminimalisir demi tercapai tujuan dan sasaran, maka perlu beberapa langkah/rencana aksi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas aparaturnya dan masyarakat dalam penanggulangan bencana daerah;
2. Mengoptimalkan sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha belum optimal;
3. Pengadaan sarana prasarana penanggulangan bencana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) belum optimal, bahkan peralatan pemadam kebakaran hutan dan lahan belum dimiliki.

.....ooo.....
#Kita JagaALAM Jaga Kita #Siap untuk Selamat
.....ooo.....